

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Enrekang: Pendekatan Naskah Akademik

Febrianto Syam^{1*}, Aspin Nur Rivai², Novayanti Sopia Rukmana³, Barik ramadhani Pababari⁴, Rahman Syamsuddin⁵

¹Prodi Politik, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Univeristas Islam Negeri Alauddin. Jl.H.M.Yasin Limpo No 36, Gowa,Sulawesi Selatan,Indonesia

²Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Univeristas Islam Negeri Alauddin Jl.H.M.Yasin Limpo No 36, Gowa,Sulawesi Selatan,Indonesia

³Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Univeristas Negeri Makassar. Jl.AP Pettarani, Makassar,Sulawesi Selatan,Indonesia

⁴Prodi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Univeristas Islam Negeri Alauddin. Jl.H.M.Yasin Limpo No 36, Gowa,Sulawesi Selatan,Indonesia

^{1*}febrianto.syam@uin-alauddin.ac.id,²aspin.arifin@uin-alauddin.ac.id,³novayanti@unm.ac.id,

⁴rahman.syamsuddin@uin-alauddin.ac.id,⁵Barikramdhani17@gmail.com

* Corresponding Author: Febrianto Syam

Received: April, 2024

Accepted: April, 2024

Published: April 2024

Abstract

Preparing quality draft regional regulations requires a systematic and comprehensive process. This research examines the efforts of the Acihr UIN Alauddin Makassar LAB in drafting regional regulations regarding providing incentives and facilitating investment in the Enrekang Regency. This activity lasted for seven months and involved field observations, data analysis, and preparation of academic texts. Field observations were carried out to understand the conditions and needs of the community regarding investment, while data analysis involved studying relevant literature. The results of the observations are outlined in an academic text that academically examines important materials such as problem formulation, legal basis, philosophical, sociological, and juridical basis, as well as targets, scope, and direction of regulation. The academic text is a reference for the DPRD and the Enrekang Regency Government in formulating content material for draft regional regulations and providing input regarding the urgency and substance of the rules. Based on the academic text, the team produced a draft regional regulation regarding providing incentives and ease of investment, which functions as a legal umbrella to attract investment. This draft is then studied in more depth with the DPRD and related departments to ensure that it is followed by the expected principles, benefits, and objectives and can be implemented effectively. This research concludes that drafting regional regulations requires systematic and comprehensive efforts involving various parties to produce quality regulations and support the investment climate in the region.

Keywords: Regional Regulations, Investment, Incentives, Academic Papers, Enrekang

Abstrak

Penyusunan rancangan peraturan daerah yang berkualitas memerlukan proses sistematis dan komprehensif. Penelitian ini mengkaji upaya LAB Acihr UIN Alauddin Makassar dalam menyusun rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Enrekang. Kegiatan ini berlangsung selama tujuh bulan dengan melibatkan observasi lapangan, analisis data, dan penyusunan naskah akademik. Observasi lapangan dilakukan untuk memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat terkait investasi, sedangkan analisis data melibatkan studi literatur yang relevan. Hasil observasi dituangkan dalam naskah akademik yang mengkaji secara akademis materi-materi penting seperti perumusan masalah, dasar hukum, landasan filosofis, sosiologis, yuridis, serta sasaran, ruang lingkup, dan arah pengaturan. Naskah akademik berfungsi sebagai acuan bagi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam merumuskan materi muatan rancangan peraturan daerah, dan memberikan masukan tentang urgensi serta substansi peraturan. Berdasarkan naskah akademik, tim menghasilkan rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi yang berfungsi sebagai payung hukum dalam upaya menarik investasi. Rancangan ini kemudian dikaji lebih mendalam bersama DPRD dan Dinas terkait untuk memastikan kesesuaian dengan asas, manfaat, dan tujuan yang diharapkan serta dapat diterapkan secara efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyusunan rancangan peraturan daerah membutuhkan upaya sistematis dan komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak untuk menghasilkan peraturan yang berkualitas dan mendukung iklim investasi di daerah.

Kata Kunci: *Peraturan Daerah, Investasi, Insentif, Naskah Akademik, Enrekang*

1. PENDAHULUAN

Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia (Akhsan, 2018; Nadzir & Setyaningrum Kenda, 2023; Nirwana et al., 2017). Kehadiran investasi, baik domestik maupun asing, dapat memberikan dampak positif berupa penyerapan tenaga kerja, peningkatan produktivitas, transfer teknologi, hingga peningkatan ekspor. Berdasarkan laporan Ease of Doing Business 2020 yang dirilis oleh Bank Dunia, Indonesia menempati peringkat ke-73 dari 190 negara, di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam iklim investasi di Indonesia.

Untuk menarik minat investor, pemerintah daerah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif, salah satunya melalui penyusunan regulasi pemberian insentif dan kemudahan investasi (BKPM, 2022). Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik minat investor dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dan insentif untuk mempermudah investasi, seperti penyederhanaan perizinan, pemberian tax holiday, dan kemudahan lainnya ((BKPM, 2022; Yosep et al., 2020).

Selain masalah regulasi, terdapat beberapa masalah lain yang kerap menjadi penghambat dalam menarik investasi di Indonesia. Pertama, masalah infrastruktur. Menurut penelitian (Nugroho & Susilowati, 2021), infrastruktur menjadi faktor penting yang memengaruhi investasi asing langsung di sektor manufaktur Indonesia.

Keterbatasan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan pasokan energi dapat menghambat aktivitas investasi dan operasional perusahaan. Kedua, masalah ketersediaan tenaga kerja terampil. Dalam penelitian yang sama, (Nugroho & Susilowati, 2021) menemukan bahwa ketersediaan tenaga kerja terampil menjadi faktor penting bagi investor asing di sektor manufaktur. Kekurangan tenaga kerja terampil dapat menjadi kendala bagi investor dalam mengembangkan usahanya di Indonesia.

Ketiga, masalah korupsi dan kepastian hukum. (Firmansyah & Syam, 2022) menyatakan bahwa korupsi dan kepastian hukum masih menjadi kendala bagi investor asing di Indonesia. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan meningkatkan risiko investasi. Keempat, masalah stabilitas politik dan keamanan. (Sari & Satrianto, 2021) menemukan bahwa stabilitas politik dan keamanan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi investasi asing langsung di Indonesia. Situasi politik yang tidak stabil dan keamanan yang terganggu dapat mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kelima, masalah biaya logistik dan perdagangan. (Irawan & Soesilo, 2021) mengungkapkan bahwa biaya logistik dan perdagangan yang tinggi di Indonesia dapat menjadi penghambat bagi investor asing. Hal ini dapat memengaruhi daya saing produk dan profitabilitas perusahaan.

Beberapa penelitian terkini telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi investasi di Indonesia dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Seperti yang dikemukakan oleh (Firmansyah & Syam, 2022; Yosep et al., 2020), "Faktor-faktor yang memengaruhi investasi asing langsung di Indonesia antara lain inflasi, nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan indeks pembangunan manusia" (p. 11).

(Sari & Satrianto, 2021) juga menyatakan bahwa "Investasi asing langsung di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan sumber daya manusia" (p. 52). Selain itu, (Christianingrum, 2023) menemukan bahwa "Kebijakan pemerintah seperti insentif pajak dan deregulasi berpengaruh signifikan terhadap investasi asing langsung di Indonesia" (p. 9).

(Nugroho & Susilowati, 2021) dalam penelitiannya pada sektor manufaktur menyimpulkan bahwa "Infrastruktur, tenaga kerja terampil, dan kestabilan politik menjadi faktor penting yang memengaruhi investasi asing langsung di sektor manufaktur Indonesia". Sementara itu, (Irawan & Soesilo, 2021) menemukan bahwa "Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap investasi asing langsung di Indonesia periode 2015-2020".

Penelitian-penelitian tersebut mengkaji faktor-faktor seperti stabilitas politik, infrastruktur, tenaga kerja, regulasi, dan insentif investasi yang dapat memengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hasil dari penelitian-penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan strategi untuk meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia.

2. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan oleh tim dosen Laboratorium Alauddin Center for International Relations Studies Research (ACIRS)UIN

Alauddin Makassar yang bermitra dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Enrekang untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Enrekang selama periode 7 bulan, mulai dari bulan Maret hingga Oktober 2023. Tim terdiri dari 7 orang, terdiri dari 2 dosen Ilmu Hukum, 1 dosen Ilmu Politik, 1 dosen Hubungan Internasional, 1 dosen Ilmu Administrasi Negara, dan 2 orang mahasiswa.

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, tim ACIRS melakukan persiapan untuk pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan berkoordinasi dengan pihak DPRD Kabupaten Enrekang terkait dengan penentuan lokasi dan proses administrasi. Persiapan juga mencakup penyusunan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini, seperti surat-menyurat dengan DPRD Enrekang.

b. Tahap Observasi dan Konsultasi

Selanjutnya, tim ACIRS melakukan observasi dan konsultasi dengan pihak terkait di DPRD Enrekang untuk menentukan arah dan fokus penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Melalui koordinasi yang intensif, tim berhasil menyepakati bahwa fokus utama rancangan tersebut adalah pemberian insentif dan kemudahan investasi. Diskusi juga dilakukan untuk memahami kebutuhan dan harapan dari pihak DPRD Enrekang.

c. Tahap Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Pada tahapan ini, tim ACIRS mulai menyusun Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hasil observasi, konsultasi, dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Proses penyusunan rancangan dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh anggota tim, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan dengan tujuan dan kebutuhan Kabupaten Enrekang.

d. Tahap Presentasi dan Diskusi Publik

Setelah penyusunan selesai, tim ACIRS melakukan presentasi dan diskusi publik mengenai Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun. Diskusi ini melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk anggota DPRD Enrekang, stakeholders lokal, serta masyarakat umum. Feedback dan masukan dari diskusi publik ini kemudian menjadi bahan evaluasi dan perbaikan lebih lanjut bagi Rancangan Peraturan Daerah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam membangun perekonomian di daerah. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan peran serta masyarakat dan sektor swasta. Peran masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk investasi dan kelangsungan usaha. Namun, saat ini minat masyarakat dan sektor swasta dalam berinvestasi di daerah masih tergolong rendah. Salah satu faktor penyebabnya yaitu belum adanya kebijakan pemerintah daerah terkait kemudahan berusaha yang mampu menarik minat masyarakat dan sektor swasta untuk berinvestasi di daerah.

Dalam upaya menyusun rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Enrekang, tim dari LAB ACIRS UIN Alauddin Makassar melakukan serangkaian kegiatan selama tujuh bulan. Kegiatan tersebut meliputi observasi lapangan untuk memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Enrekang terkait investasi. Selain itu, tim juga melakukan analisis data melalui studi literatur yang relevan.



Gambar 1. Kegiatan Pembahasan Ranperda

Hasil observasi lapangan menunjukkan Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Kabupaten Enrekang didominasi oleh 4 (empat) kategori kategori usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Konstruksi; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing kategori usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Enrekang, di tahun 2022 Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Enrekang pada tahun 2022 dihasilkan oleh kategori usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 40,03 persen (angka ini sedikit agak meningkat dari 39,23 persen di tahun 2018). Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 13,77 persen (naik dari 12,77 persen di tahun 2018), disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 12,47 persen (turun dari 12,74 persen di tahun 2018). Berikutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 7,87 persen (desikit melambat dari 8,30 persen kontribusi tersebut pada pembentukan total PDRB Kab. Enrekang di tahun 2018). (Enrekang, 2022).

Regulasi terkait kebijakan pemerintah daerah kabupaten Enrekang dalam penanaman modal diatur dengan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 30 Tahun 2017. Perbup ini hanya mengatur tentang pendelegasian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten Enrekang. Di dalam perbup ini belum mengatur secara eksplisit terhadap kebijakan daerah dalam peningkatan partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten Enrekang dipandang perlu untuk mengeluarkan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Dimana dalam

pasal 7 (1) dijelaskan bahwa **“Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada Masyarakat dan/atau investor diatur dengan peraturan daerah.”**

Naskah akademik ini bertujuan untuk mengkaji secara akademis materi-materi yang harus ada dalam rancangan peraturan daerah, meliputi perumusan masalah, dasar hukum, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta sasaran, ruang lingkup, dan arah pengaturan. Naskah akademik berfungsi sebagai bahan acuan bagi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam merumuskan materi muatan rancangan peraturan daerah. Naskah ini juga memberikan masukan kepada pemerintah daerah dan masyarakat mengenai urgensi dan substansi peraturan daerah yang akan dibentuk. Selain itu, naskah akademik memudahkan perumusan tujuan, asas-asas, dan norma pasal-pasal dalam rancangan peraturan daerah.

Berdasarkan naskah akademik yang telah disusun, tim kemudian menghasilkan rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Enrekang. Rancangan ini berfungsi sebagai payung hukum dalam upaya menarik investasi ke daerah tersebut. Selanjutnya, rancangan peraturan daerah ini dikaji lebih mendalam oleh tim bersama dengan DPRD dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan daerah yang akan ditetapkan sesuai dengan asas, manfaat, dan tujuan yang diharapkan, serta dapat diterapkan secara efektif oleh sasaran yang dimaksud.

4. KESIMPULAN

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Enrekang merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh LAB Acihr UIN Alauddin Makassar. Proses ini berlangsung selama tujuh bulan dan melibatkan serangkaian kegiatan yang terstruktur. Pada tahap awal, tim melakukan observasi lapangan untuk memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Enrekang terkait investasi. Selain itu, tim juga melakukan analisis data melalui studi literatur yang relevan guna memperkaya wawasan dan landasan teori. Hasil dari observasi lapangan kemudian dituangkan dalam rancangan naskah akademik. Naskah akademik ini menjadi instrumen penting dalam mengkaji secara akademis materi-materi yang harus ada dalam rancangan peraturan daerah. Mulai dari perumusan masalah, dasar hukum, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, hingga sasaran, ruang lingkup, dan arah pengaturan, semuanya dibahas secara komprehensif dalam naskah akademik.

Naskah akademik berfungsi sebagai bahan acuan bagi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam merumuskan materi muatan rancangan peraturan daerah. Selain itu, naskah ini juga berperan dalam memberikan masukan kepada pemerintah daerah dan masyarakat mengenai urgensi dan substansi peraturan daerah yang akan dibentuk. Lebih lanjut, naskah akademik memudahkan perumusan tujuan, asas-asas, dan norma pasal-pasal dalam rancangan peraturan daerah. Berdasarkan naskah akademik yang telah disusun, tim akhirnya dapat menghasilkan rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Enrekang. Rancangan ini berfungsi sebagai payung hukum dalam upaya menarik investasi ke daerah tersebut. Namun, sebelum ditetapkan, rancangan peraturan daerah ini dikaji lebih mendalam bersama dengan DPRD dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang. Proses ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan asas, manfaat, dan tujuan yang diharapkan, serta dapat diterapkan secara efektif oleh sasaran yang dimaksud.

Dengan demikian, penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Enrekang merupakan sebuah proses sistematis dan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Mulai dari observasi lapangan, kajian akademis, hingga pengkajian mendalam bersama DPRD dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah peraturan daerah yang berkualitas dan mampu mendukung iklim investasi di Kabupaten Enrekang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhsan, A. (2018). PENGARUH INDEX PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI KABUPATEN ENREKANG. *Economos : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(3), 49. <https://doi.org/10.31850/economos.v1i3.567>
- Christianingrum, R. (2023). KORUPSI DAN PENANAMAN MODAL ASING: PERBAIKAN KELEMBAGAAN. *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 8(2), 332–353. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v8i2.166>
- Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2022). Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 325–344. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>
- Irawan, B., & Soesilo, N. I. (2021). Dampak Kebijakan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit terhadap Permintaan CPO pada Industri Hilir. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 12(1), 29–43. <https://doi.org/10.22212/jekp.v12i1.2023>
- BKPM, B. K. P. M. (2022). *Kementerian Investasi/BKPM - Halaman Laporan Realisasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM*. <https://bkpm.go.id/id/info/realisasi-investasi/2022>
- Nadzir, M., & Setyaningrum Kenda, A. (2023). Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri: Pengaruhnya pada Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha* (Vol. 14).
- Nirwana, D. C., Muhammadiyah, M., & Hasanuddin, M. (2017). Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Enrekang. *KOLABORASI : JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 3(1), 01. <https://doi.org/10.26618/kjap.v3i1.890>
- Nugroho, M. W., & Susilowati, S. (2021). AWAL POTENSI KEWILAYAHAN SUMBER DAYA JALUR LINTAS SELATAN PROPINSI JAWA TIMUR. *JURNAL TECNOSCENZA*, 6(1), 87–103. <https://doi.org/10.51158/tecnoscienza.v6i1.550>
- Sari, W. N., & Satrianto, A. (2021). Pengaruh Stabilitas Politik, Kriminalitas dan Daya Saing Global Terhadap Investasi Asing Langsung di 6 Negara Asean. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 3(3), 65. <https://doi.org/10.24036/jkep.v3i3.12370>
- Yosep, M. A., Sudaryo, Y., Kusumawardani, A., & Limakrisna, N. (2020). Implementing Digital Marketing to Increase Satisfaction and Impact on the Image of Banking PT. Bank Central Asia Tbk. *Journal of Accounting and Finance Management*, 1(1), 41–45. <https://doi.org/10.38035/JAFM.V1i1.10>

